BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, terus berupaya mencapai kemajuan di berbagai sektor. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), tujuan utama bangsa ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar, sehingga diperlukan sumber pembiayaan yang kuat. Pajak menjadi sumber pemasukan utama negara untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah, sehingga peran pajak sangat penting (Rahmi, Setiawan et al., 2024).

Sumber daya alam tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pendapatan Indonesia untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini sejalan dengan perkataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa pajak merupakan salah satu komponen terpenting dalam APBN yang mendukung jalannya pemerintahan, serta mendanai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Penghasilan (PPh) dipungut secara langsung terhadap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, merupakan sumber utama penerimaan pajak (Nur, 2024). Mengacu pada peraturan yang berlaku, pajak merupakan pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh seluruh warga negara Indonesia,

baik perorangan maupun badan usaha. Pembayaran pajak ini dilakukan agar masyarakat dapat mematuhi ketentuan pemerintah tanpa mengharapkan imbalan secara langsung (Asriati, Tripalupi et al., 2022).

Bagi perusahaan, pajak termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi keuntungan atau laba karena pajak dianggap sebagai biaya atau beban yang harus ditanggung. Untuk menghitung beban pajak penghasilan badan, yaitu dengan cara mengurangi total pendapatan perusahaan dari beban atau biayanya (Mulyadi, 2024). Besarnya PPh Badan yang wajib dibayar oleh perusahaan ditentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang dihitung setelah memperhitungkan seluruh pendapatan dan beban perusahaan. Jumlah pajak tersebut kemudian dikenakan tarif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode untuk mematuhi UU pajak dan mengurangi pajak keseluruhannya secara hukum. Salah satu strategi yang dapat diterapkan yaitu penguatan struktur modal atau peningkatan pembiayaan melalui utang, yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merefleksikan proporsi pendanaan aset perusahaan yang bersumber dari utang dibanding dengan ekuitas, sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat utang perusahaan (Rahayu, Gojali et al., 2024). DER menggambarkan bagaimana perusahaan mendanai kegiatan operasionalnya, terutama melalui pemanfaatan utang. Bagi investor, tingkat utang ini menjadi acuan untuk menilai stabilitas dan kondisi finansial perusahaan. Menurut (Silalahi & Nasution, 2022) DER mengindikasikan persentase dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham dibanding dengan

pemberi utang. Semakin tinggi rasio ini, semakin banyak utang yang digunakan, yang akan berdampak pada jumlah pembayaran pajak perusahaan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Mulyadi, 2024) mengenai “Pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022)” penggunaan DER sebagai indikator struktur modal menunjukkan adanya pengaruh terhadap besaran PPh Badan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peningkatan DER cenderung menurunkan nilai PPh Badan Terutang. Meskipun demikian, temuan ini bertentangan dengan penelitian lain yang memperlihatkan hubungan yang berbeda antara kedua variabel tersebut. Dalam penelitian (Arisandy, 2021) menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap PPh Badan.

Perencanaan perpajakan dipandang berkaitan dengan pajak penghasilan perusahaan karena ini merupakan pendekatan yang diambil oleh manajemen perusahaan guna meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Arisandy, 2021). Perencanaan pajak ini tidak dimaksudkan untuk melakukan manipulasi dalam sistem perpajakan. Namun, untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan tanpa merugikan pemerintah dan dilakukan secara legal untuk mencapai penghematan pajak secara efisien.

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur perencanaan pajak yaitu *Tax Retention Rate* (TRR). TRR merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan perpajakan dalam laporan keuangan suatu perusahaan

pada periode berjalan. TRR mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu mempertahankan laba bersih setelah pajak, sehingga menggambarkan keberhasilan strategi manajemen pajak yang telah diterapkan. Menurut (Jaori, 2022) TRR adalah metode pengukuran perencanaan pajak dengan cara membandingkan *net income* (laba bersih) terhadap *pretax income* (laba sebelum pajak perusahaan). Dengan demikian, TRR yang tinggi mengindikasikan efektifitas perencanaan pajak yang dilakukan. Sebaliknya, TRR yang rendah mengindikasikan perencanaan pajak yang kurang efektif.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Mulyadi, 2024) mengenai “Pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022)” pengukuran TRR sebagai indikator perencanaan pajak menunjukkan bahwa TRR mempengaruhi PPh Badan, di mana semakin tinggi keuntungannya, semakin besar pula beban pajaknya. Oleh karenanya, perusahaan berupaya melakukan berbagai strategi untuk mengurangi beban pajaknya. Namun, hasil penelitian (Arisandy, 2021) mengungkapkan bahwa DER secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Beban Pajak PPh Badan.

Dalam menjalankan bisnis, perusahaan tentu akan berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraan investor atau pemegang saham dengan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan yang stabil ini akan menarik minat investor untuk ikut berinvestasi dalam bisnis (Musthofa, Badriyah et al., 2022).

Namun, laba yang terdaftar tidak selalu menggambarkan situasi ekonomi yang sesungguhnya karena adanya praktik manajemen laba. Manajemen laba yaitu tindakan manajemen guna menyesuaikan atau memodifikasi laba didalam laporan keuangan dengan memanfaatkan celah dalam standar akuntansi sehingga laba tampak konsisten atau sesuai dengan target tertentu (Chofifah, 2024).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Undrian & Yanti, 2023) mengenai “Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba dengan Kompensasi Manajemen sebagai Variabel Moderasi” menyatakan DER mempengaruhi manajemen laba, karena DER dapat mendorong manajer untuk mengelola laba agar memberikan kesan positif kepada pemilik, kreditur, investor dan pengguna laporan keuangan lainnya. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan termuan (Putra, Malesa, & Sri, 2024) yang mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan DER terhadap manajemen laba.

Perusahaan yang berhasil melakukan perencanaan pajak dengan baik akan mengalami penurunan laba karena adanya pengurangan beban pajak. Perencanaan perpajakan ini mempunyai hubungan positif dengan manajemen laba, karena manajemen terdorong untuk mengatur laba agar dapat berdampak pada besaran pajak dengan meminimalkan laba sebelum pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Amelia, Sari, & Hariadi, 2023) “Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021)” mengatakan bahwa penggunaan alat ukur TRR untuk perencanaan pajak

memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gulo & Agoestina, 2022) yang menunjukkan hasil negatif, bahwa penggunaan TRR sebagai alat ukur perencanaan pajak tidak berdampak pada manajemen laba.

Berikut disajikan tabel yang berisi data mengenai *Debt to Equity Ratio* (DER), *Tax Retention Rate* (TRR), Beban Pajak Penghasilan Badan (Beban Pph Badan) dan Manajemen Laba pada perusahaan subsektor *Property & Real Estate* yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2021-2023 yakni:

Tabel 1.1
Data *Debt to Equity Ratio* (DER), *Tax Retention Rate* (TRR), Beban PPH Badan dan Manajemen Laba pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI pada tahun 2021-2023

No	Kode	Periode	DER	Ket	TRR	Ket	Ln (Beban PPh)	Ket	DAC (ML)	Ket
1	BCIP	2021	0.99		0.04		21.57		-0.091	
		2022	0.91	↓	0.80	↑	21.53	↓	0.008	↑
		2023	0.89	↓	0.82	↑	21.37	↓	0.018	↑
2	CSIS	2021	0.83		1.01		18.65		-0.047	
		2022	0.76	↓	0.88	↓	21.85	↑	-0.026	↓
		2023	0.74	↓	0.94	↑	19.60	↓	-0.027	↓
3	HOMI	2021	1.22		0.91		21.18		-0.170	
		2022	1.09	↓	0.79	↓	21.34	↑	-0.117	↓
		2023	0.69	↓	0.62	↓	21.18	↓	-0.143	↓
4	KIJA	2021	0.93		0.87		23.26		-0.074	
		2022	1.02	↑	0.84	↓	22.79	↓	-0.110	↓
		2023	0.87	↓	0.93	↑	24.38	↑	-0.068	↓

Sumber: Laporan keuangan setiap perusahaan (Data diolah oleh peneliti 2025)

Dengan melihat data tabel 1.1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021-2023 DER pada perusahaan subsektor *property and real estate* mengalami penurunan

ditiap tahunnya. Menurut (Mulyadi, 2024) jika DER meningkat maka nilai Beban PPh Badan akan cenderung menurun.

Berdasarkan tabel 1.1 masih banyak ketidaksesuaian antara teori dengan fakta di lapangan. Seharusnya, ketika DER mengalami kenaikan maka akan memberikan dampak baik terhadap Beban PPh badan, sehingga Beban Pph badan perusahaan tersebut akan menurun, begitupun sebaliknya. Namun kondisi di lapangan tidaklah demikian, dalam tabel 1.1 pada tahun 2023 PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIP) mengalami penurunan DER tetapi Beban PPh badan pun ikut menurun. Hal ini serupa juga pada PT Cahayasakti Investindo Sukses (CSIS) dan PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) pada tahun 2023.

Semakin tinggi rasio DER, perusahaan akan semakin berisiko melanggar aturan yang ada dalam perjanjian utang. Akibatnya, perusahaan bisa mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur. Situasi ini bisa mendorong manajemen menjalankan manajemen laba lewat penurunan atau peningkatan laba yang dilaporkan. Teori ini sejalan dengan temuan (Undrian & Yanti, 2023) yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha memodifikasi laba yang dilaporkan untuk memenuhi harapan kreditur dan investor jika DER lebih besar. Pada tabel 1.1 ketika DER PT Bumi Citra Permai Tbk (BCIP) menurun perusahaan melakukan Manajemen Laba dengan menaikkan labanya. Sedangkan pada PT Cahayasakti Investindo Sukses (CSIS), PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) dan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) saat DER menurun, perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan jumlah laba.

TRR menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menekan pengeluaran terkait kewajiban pajak. Dengan kata lain, semakin rendah beban pajak yang ditanggung, maka semakin besar keuntungan yang didapat perusahaan. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Thaliya, 2021) jika TRR tinggi, maka Beban PPh Badan cenderung rendah. Kondisi ini muncul dikarenakan kemampuan perusahaan dalam meminimalkan pajak untuk mencapai keuntungan yang optimal. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan data pada tabel 1.1 yang memperlihatkan bahwa PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) mengalami penurunan TRR diikuti Beban Pph yang mengalami penurunan. Sedangkan, pada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) memperlihatkan kenaikan pada TRR yang diikuti oleh kenaikan Beban PPh.

Menurut (Amelia, Sari, & Hariadi, 2023) ketika nilai TRR meningkat perusahaan cenderung lebih besar kemungkinannya untuk melakukan manajemen laba. Pada tabel 1.1 ketika TRR PT. BCIP meningkat perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan labanya. Sedangkan pada PT Cahayasakti Investindo Sukses (CSIS) dan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) pada tahun 2023, ketika TRR naik manajemen laba yang dilakukan perusahaan yaitu dengan cara menurunkan laba.

Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ini karena terdapat perbedaan antara teori dan kondisi di lapangan, serta perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan mengacu pada latar belakang di atas, peneliti termotivasi untuk menetapkan judul penelitian "**Pengaruh *Debt to Equity***

Ratio dan Tax Retention Rate terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan dan Manajemen Laba pada perusahaan subsektor Property and Real Estate yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2021-2023”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2023?
2. Bagaimana *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2023?
3. Bagaimana *Tax Retention Rate* berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2023?
4. Bagaimana *Tax Retention Rate* berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2023?
5. Bagaimana *Debt to Equity Ratio* dan *Tax Retention Rate* berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2023?

6. Bagaimana *Debt to Equity Ratio* dan *Tax Retention Rate* berpengaruh terhadap Manajemen Laba pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2023?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2023?
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Manajemen Laba pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2023?
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Tax Retention Rate* terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2023?
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Tax Retention Rate* terhadap Manajemen Laba pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2023?
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* dan *Tax Retention Rate* terhadap Beban PPh Badan pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2023?

6. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* dan *Tax Retention Rate* terhadap Manajemen Laba pada perusahaan subsektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di ISSI tahun 2021-2023?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai *literatur review* bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait *Debt to Equity Ratio*, *Tax Retention Rate*, Beban Pajak Penghasilan Badan dan Manajemen Laba

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan subsektor *Properti and Real Estate* yang terdaftar ISSI untuk merumuskan kebijakan pendanaan dan pengelolaan pajak dengan lebih efektif.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman maupun pengetahuan peneliti mengenai topik yang diangkat yaitu terkait *Debt to Equity Ratio*, *Tax Retention Rate*, Beban Pajak Penghasilan Badan dan Manajemen Laba.